

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Dewasa ini pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasi tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Adapun pajak yang diberlakukan terdiri dari pajak penghasilan (PPH), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak pertambahan nilai (PPN), Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan nota laporan keuangan Negara periode tahun 2008 Target Penerimaan sebesar Rp 571,10 triliun namun Realisasi pada 2008 mencapai Rp 494,08 triliun atau hanya tercapai sebesar 86.51%, sedangkan pada periode tahun 2009 Target Penerimaan sebesar Rp 565,77 triliun namun Realisasi pada 2009 mencapai Rp 515,73 triliun atau hanya tercapai sebesar 91.16%.

Maka dalam rangka meningkatkan penerimaan PPN maka Direktorat Jendral Pajak sedang melakukan reformasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Salah satu bentuk Reformasi perpajakan adalah merevisi UU PPN No 18 tahun 2000 menjadi UU PPN No 42 tahun 2009 yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan serta memperluas objek dan subjek pajak.

Seberapa besar pengaruhnya revisi UU PPN No 42 tahun 2009 terhadap penerimaan PPN adalah masalah yang aktual dan relevan untuk diadakan penelitian.

Maka penulis sangat tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap adanya revisi UU No 18 tahun 2000 menjadi UU No 42 tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan penerimaan dari setoran masa PPN dalam negeri, Pemungut PPN dalam negeri dan STP PPN dalam negeri serta meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan khususnya pajak pertambahan nilai (PPN). maka dari itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul ” **ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SEBELUM DAN SESUDAH REVISI UU PPN PADA KPP X** “.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerimaan PPN dari setoran masa PPN dalam negeri sebelum dan sesudah revisi UU PPN pada KPP "X".
2. Bagaimana penerimaan PPN dari pemungut PPN dalam negeri sebelum dan sesudah revisi UU PPN pada KPP "X".
3. Bagaimana penerimaan PPN dari STP masa PPN dalam negeri sebelum dan sesudah revisi UU PPN pada KPP "X".

## **C. Tujuan dan Manfaat penulisan**

### 1. Tujuan Penulisan

Selanjutnya setelah penulis merumuskan masalah, maka tujuan yang akan dicapai adalah :

- a. Mengetahui penerimaan PPN dari pemungut PPN dalam negeri sebelum dan sesudah revisi UU PPN.
- b. Mengetahui penerimaan PPN dari setoran masa PPN dalam negeri sebelum dan sesudah revisi UU PPN.
- c. Mengetahui penerimaan PPN dari STP masa PPN dalam negeri sebelum dan sesudah revisi UU PPN.

- d. Mengetahui hasil perbandingan penerimaan PPN sebelum dan sesudah revisi UU PPN.

## 2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini adalah :

### a. Penulis.

Untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana penulis telah menguasai ilmu-ilmu yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan dan sejauh mana penulis dapat memecahkan masalah yang sedang diteliti.

### b. Kantor pelayanan pajak pratama Jakarta cakung satu.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan mengetahui sejauh mana pengawasan pemerintah dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga realisasi penerimaan perpajakan berpengaruh terhadap pendapatan Negara.

### c. Masyarakat dan pembaca.

Dapat dijadikan acuan atau sumber bacaan yang dapat dipertimbangkan selama meneliti dan memecahkan masalah yang relevan.